

## **DAMPAK KEBIJAKAN ZONASI SEKOLAH TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN DI WILAYAH PERKOTAAN**

**Eryn Irsa Ningtyas<sup>1</sup>, Karwanto<sup>2</sup>, Amrozi Khamidi<sup>3</sup>**  
Universitas Negeri Surabaya<sup>1,2,3</sup>  
24010845051@mhs.unesa.ac.id<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak kebijakan zonasi sekolah terhadap kualitas pendidikan di wilayah perkotaan, dengan fokus pada dinamika dan tantangan yang muncul dalam implementasinya. Kebijakan zonasi, yang dirancang untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan antar sekolah, telah memicu berbagai perubahan signifikan dalam sistem pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang diperluas, menggabungkan analisis data sekunder dari jurnal akademik, laporan pemerintah, dan media kredibel, dengan teknik analisis wacana dan kebijakan multi-level untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem zonasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pemerataan akses pendidikan dan inklusivitas siswa, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks seperti ketimpangan kualitas sekolah, resistensi masyarakat, dan distribusi sumber daya yang belum merata. Dampak positif yang teridentifikasi meliputi peningkatan keberagaman siswa, pemerataan sumber daya pendidikan, dan peningkatan keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Namun, dampak negatif seperti ketimpangan fasilitas antar sekolah, kesulitan dalam adaptasi kurikulum, dan ketidakpuasan masyarakat juga muncul sebagai isu penting yang perlu diatasi. Penelitian ini menekankan urgensi strategi implementasi yang komprehensif dan terintegrasi, yang mencakup peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh, pemerataan distribusi guru yang berkualitas, dan sosialisasi kebijakan yang efektif kepada semua pemangku kepentingan. Selain itu, diperlukan koordinasi yang kuat antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, serta perubahan persepsi masyarakat tentang sekolah unggulan. Penelitian, bahwa kebijakan zonasi memiliki potensi besar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas jika diimbangi dengan upaya peningkatan mutu sekolah yang berkelanjutan dan strategi implementasi yang tepat sasaran.

**Kata Kunci:** Kebijakan Zonasi Sekolah, Kualitas Pendidikan, Wilayah Perkotaan

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze in depth the impact of school zoning policy on education quality in urban areas, focusing on the dynamics and challenges that arise in its implementation. The zoning policy, which was designed to realize equal access to education and reduce gaps between schools, has triggered significant changes in the education system. This study uses an extended qualitative descriptive approach, combining secondary data analysis from academic journals, government reports, and credible media, with multi-level discourse and policy analysis techniques to gain a comprehensive understanding. The results show that the zoning system has had a significant impact on equal access to education and student inclusiveness, but is still faced with various complex challenges such as inequality in school quality, community resistance, and unequal distribution of resources. Positive impacts identified include increasing student diversity, equal distribution of educational resources, and increasing parental involvement in education. However, negative impacts such as inequality in facilities between schools, difficulties in curriculum adaptation, and community dissatisfaction also emerged as important issues that need to be addressed. This study emphasizes the urgency of a comprehensive and integrated implementation strategy, which includes improving the quality of schools as a whole, equalizing the distribution of quality teachers, and effectively disseminating policies to all stakeholders. In addition, strong coordination between stakeholders is*

*needed, including the government, schools, parents, and the community, as well as changing public perceptions about superior schools. The study, that zoning policies have great potential in realizing equal distribution of quality education if balanced with efforts to improve the quality of schools that are sustainable and targeted implementation strategies.*

**Keywords:** School Zoning Policy, Education Quality, Urban Areas

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Kualitas pendidikan yang baik menjadi kunci untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan zonasi sekolah. Kebijakan ini bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, mengurangi kesenjangan antara sekolah favorit dan non-favorit, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Penerapan kebijakan zonasi diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang status sosial ekonomi atau lokasi tempat tinggal. Namun, implementasi kebijakan ini di wilayah perkotaan menimbulkan berbagai dinamika dan dampak yang perlu dikaji secara mendalam.

Wilayah perkotaan, dengan segala kompleksitasnya, menjadi arena yang menarik untuk menganalisis dampak kebijakan zonasi sekolah. Kepadatan penduduk, variasi status sosial ekonomi, dan perbedaan kualitas infrastruktur pendidikan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan ini. Di satu sisi, kebijakan zonasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan siswa di sekolah-sekolah favorit, yang seringkali terletak di pusat kota, dan mendorong pengembangan sekolah-sekolah di pinggiran kota. Di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait penurunan kualitas sekolah-sekolah favorit, munculnya praktik kecurangan dalam penerimaan siswa, dan potensi kurangnya motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dampak kebijakan zonasi sekolah terhadap kualitas pendidikan di wilayah perkotaan, dengan fokus pada aspek-aspek seperti pemerataan akses, kualitas sekolah, motivasi belajar siswa, dan tantangan implementasi.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kebijakan zonasi sekolah bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Kebijakan ini terkait erat dengan kebijakan-kebijakan lain dalam bidang pendidikan, seperti kebijakan peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum, dan penyediaan infrastruktur pendidikan. Oleh karena itu, analisis dampak kebijakan zonasi sekolah harus dilakukan secara holistik, dengan mempertimbangkan interaksi antara berbagai kebijakan tersebut. Selain itu, perlu juga untuk mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah perkotaan, yang dapat mempengaruhi penerimaan dan efektivitas kebijakan zonasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kompleksitas dampak kebijakan zonasi sekolah dan memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Selain itu, kebijakan zonasi menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, terutama orang tua siswa. Banyak orang tua merasa kebijakan ini membatasi pilihan mereka dalam menentukan sekolah terbaik bagi anak-anak mereka. Beberapa di antaranya bahkan berupaya mencari cara untuk mengakali sistem dengan memanipulasi alamat tempat tinggal agar anak mereka dapat diterima di sekolah tertentu. Fenomena ini menunjukkan adanya resistensi terhadap kebijakan zonasi, yang berakar pada persepsi ketimpangan kualitas antar sekolah yang masih cukup signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut dampak kebijakan zonasi terhadap kualitas pendidikan di wilayah perkotaan. Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan implikasi dari kebijakan zonasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan ini terhadap kualitas pendidikan di lingkungan perkotaan. Artikel ini akan mengeksplorasi sejauh mana

kebijakan zonasi berhasil dalam mencapai tujuannya, serta hambatan yang masih perlu diatasi agar sistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas dapat terwujud. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan zonasi serta rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis data sekunder untuk mengkaji dampak kebijakan zonasi sekolah. Studi literatur akan dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait kebijakan zonasi sekolah, teori-teori yang relevan, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Analisis data sekunder akan dilakukan terhadap data-data kualitas pendidikan, seperti nilai ujian nasional, tingkat kelulusan, dan data-data lain yang relevan, untuk melihat perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah penerapan kebijakan zonasi. Dengan demikian, penelitian menjadi tertarik untuk mengangkat judul yaitu "Dampak Kebijakan Zonasi Sekolah terhadap Kualitas Pendidikan di Wilayah Perkotaan".

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder dari jurnal akademik, laporan pemerintah, serta berita dari sumber terpercaya. Analisis dilakukan dengan pendekatan komparatif terhadap data sebelum dan sesudah implementasi kebijakan zonasi. Menurut Creswell (2014), metode deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang efektif dalam memahami fenomena sosial yang kompleks, terutama dalam kebijakan pendidikan. Dengan metode ini, penelitian dapat menggali informasi secara mendalam mengenai dampak zonasi terhadap kualitas pendidikan tanpa harus melakukan intervensi langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan komparatif, yang memungkinkan peneliti untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi kebijakan zonasi. Bogdan dan Biklen (1992) menyatakan bahwa pendekatan ini sangat relevan dalam studi kebijakan publik karena dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Selain itu, pendekatan ini juga membantu dalam memahami bagaimana kebijakan zonasi berdampak pada pemerataan akses pendidikan serta kualitas pembelajaran di berbagai sekolah di wilayah perkotaan. Lebih lanjut, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup jurnal akademik, laporan resmi dari pemerintah, serta berita dari media yang kredibel. Patton (2002) menekankan bahwa penggunaan data sekunder dari berbagai sumber terpercaya memungkinkan triangulasi data, yang dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Dengan demikian, analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan komprehensif mengenai implementasi kebijakan zonasi dan dampaknya terhadap sistem pendidikan di wilayah perkotaan.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif yang diperluas, menggabungkan analisis data sekunder dengan teknik analisis wacana dan analisis kebijakan multi-level untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak kebijakan zonasi sekolah di wilayah perkotaan.

### **1. Analisis Data Sekunder yang Mendalam**

#### **a. Sumber Data yang Diperluas**

Selain jurnal akademik, laporan pemerintah, dan berita dari sumber terpercaya, penelitian ini akan menyertakan data dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada pendidikan, laporan dari organisasi internasional seperti UNESCO atau OECD, dan data dari platform daring yang menyediakan informasi tentang pendidikan.

Data statistik pendidikan dari dinas pendidikan setempat akan dianalisis secara mendetail, termasuk data tentang prestasi siswa, tingkat kehadiran, dan tingkat kepuasan orang tua.

- b. Teknik Analisis yang Diperkaya  
Analisis komparatif tidak hanya membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi kebijakan zonasi, tetapi juga membandingkan dampak kebijakan di berbagai wilayah perkotaan dengan karakteristik yang berbeda.  
Analisis wacana akan digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan zonasi direpresentasikan dalam berbagai sumber data, termasuk media massa, dokumen kebijakan, dan diskusi publik.  
Analisis konten kualitatif akan diterapkan untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari data sekunder, seperti pemerataan akses, kualitas pembelajaran, dan dampak sosial.
2. Analisis Kebijakan Multi-Level
  - a. Konteks Kebijakan yang Lebih Luas  
Penelitian ini akan menganalisis kebijakan zonasi dalam konteks kebijakan pendidikan yang lebih luas, termasuk kebijakan tentang kurikulum, pelatihan guru, dan pendanaan sekolah.  
Analisis akan dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, dan kota untuk memahami bagaimana kebijakan zonasi diimplementasikan dan diadaptasi di berbagai tingkat pemerintahan.
  - b. Analisis Stakeholder  
Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis peran dan perspektif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, siswa, dan masyarakat sipil.  
Analisis stakeholder akan membantu dalam memahami bagaimana kebijakan zonasi mempengaruhi berbagai kelompok dan bagaimana mereka merespons kebijakan tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Sistem Zonasi**

Sistem zonasi, dalam konteks pendidikan, merujuk pada kebijakan yang mengatur penerimaan peserta didik baru berdasarkan wilayah tempat tinggal. Kebijakan ini, sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2018, dirancang untuk memastikan pemerataan akses pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan kesenjangan yang sering kali mencolok antara sekolah-sekolah yang dianggap favorit dan yang tidak, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah. Konsep ini berakar dari pemikiran bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka, berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas di dekat tempat tinggal mereka. Mulyasa (2018) memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai sistem zonasi sebagai strategi pemerataan pendidikan. Menurutnya, zonasi bukan hanya sekadar pengaturan administratif, tetapi juga merupakan upaya untuk mengurangi segregasi sosial dalam pendidikan. Dengan menempatkan siswa dari berbagai latar belakang dalam satu sekolah, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang lebih inklusif dan beragam. Selain itu, Mulyasa juga menyoroti manfaat lain dari zonasi, yaitu peningkatan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak dan pengurangan beban biaya transportasi bagi siswa. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan dari semua pihak yang terlibat.

Suyanto (2019) melihat sistem zonasi sebagai bentuk reformasi pendidikan yang menekankan prinsip keadilan dan inklusivitas. Dalam pandangannya, kebijakan ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk mengakses sekolah negeri tanpa harus bersaing secara ketat berdasarkan nilai akademik semata. Ini merupakan langkah maju dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata. Namun, Suyanto juga

mengingatikan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pemerataan kualitas sekolah di setiap zona. Tanpa adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas sekolah di semua zona, kebijakan zonasi berpotensi menciptakan ketidakadilan baru.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2020) memberikan perspektif empiris mengenai dampak kebijakan zonasi. Ia menyoroti bahwa kebijakan ini telah berdampak pada pola seleksi siswa yang lebih inklusif. Namun, Arifin juga menemukan bahwa masih terdapat perbedaan kualitas pendidikan antar sekolah yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan kebijakan zonasi adalah pemerataan, masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam implementasinya. Oleh karena itu, Arifin merekomendasikan perlunya strategi yang lebih baik dalam peningkatan mutu sekolah di berbagai zona agar sistem ini berjalan efektif. Sebuah artikel dalam Jurnal Pendidikan Nasional (2021) memberikan wawasan komparatif mengenai implementasi sistem zonasi di berbagai negara. Artikel ini menyebutkan bahwa di negara-negara dengan sistem pendidikan yang telah merata, zonasi terbukti efektif dalam menciptakan keadilan akses pendidikan. Namun, di negara berkembang seperti Indonesia, tantangan utama dalam kebijakan ini adalah kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang masih belum merata. Ini menunjukkan bahwa konteks nasional sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan zonasi. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa sistem zonasi juga memiliki implikasi terhadap dinamika sosial di masyarakat. Dengan menghilangkan seleksi berdasarkan prestasi akademik semata, kebijakan ini berpotensi mengurangi tekanan kompetisi yang tidak sehat di kalangan siswa. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai penurunan standar akademik di sekolah-sekolah yang sebelumnya dianggap favorit. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang tepat antara pemerataan akses dan penjagaan kualitas pendidikan. Dalam konteks yang lebih luas, sistem zonasi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata. Namun, implementasinya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, yang melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sekolah, orang tua, hingga masyarakat luas. Hanya dengan adanya kerjasama dan komitmen dari semua pihak, kebijakan zonasi dapat mencapai tujuannya dan memberikan manfaat yang optimal bagi pendidikan di Indonesia.

### **Penyebab Permasalahan Zonasi**

Salah satu penyebab utama permasalahan dalam kebijakan zonasi adalah ketimpangan kualitas sekolah di berbagai wilayah. Menurut Mulyasa (2019), sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas lebih baik dan tenaga pengajar yang lebih berkualitas cenderung tetap menjadi incaran orang tua siswa. Hal ini menyebabkan beberapa orang tua mencari cara untuk menyalahi sistem dengan cara pindah domisili atau memalsukan alamat agar anak mereka dapat diterima di sekolah yang dianggap lebih baik. Selain itu, permasalahan zonasi juga dipengaruhi oleh belum meratanya distribusi tenaga pendidik yang berkualitas. Menurut penelitian Arifin (2020), banyak sekolah di daerah perkotaan yang kekurangan guru yang kompeten, sementara sekolah-sekolah unggulan tetap memiliki tenaga pengajar yang lebih berpengalaman. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan di antara sekolah-sekolah yang berada dalam satu zona yang sama. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan zonasi juga menjadi faktor utama yang menyebabkan permasalahan dalam implementasinya. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan Nasional (2021), masih banyak orang tua yang tidak sepenuhnya memahami tujuan dari kebijakan ini dan justru merasa terpaksa menerima keputusan yang membatasi pilihan sekolah bagi anak-anak mereka. Akibatnya, resistensi masyarakat terhadap kebijakan ini masih cukup tinggi.

Di sisi lain, infrastruktur sekolah yang tidak memadai di beberapa zona juga memperparah permasalahan zonasi. Menurut Suyanto (2019), banyak sekolah di daerah

tertentu mengalami keterbatasan ruang kelas, sarana laboratorium, dan fasilitas penunjang lainnya. Dengan bertambahnya jumlah siswa akibat kebijakan zonasi, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kualitas pembelajaran karena daya tampung yang tidak seimbang dengan jumlah siswa yang diterima. Terakhir, sistem zonasi masih menghadapi kendala dalam hal pengawasan dan evaluasi kebijakan. Menurut laporan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2022), masih terdapat kasus penyalahgunaan dalam penerapan zonasi, seperti manipulasi data domisili serta kurangnya mekanisme untuk menilai efektivitas kebijakan ini dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa sistem zonasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awalnya.

## **Dampak terhadap Kualitas Pembelajaran**

### **Dampak positif**

Kebijakan zonasi sekolah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah negeri. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya keberagaman siswa dalam satu sekolah. Dengan diterapkannya zonasi, sekolah menerima siswa dari berbagai latar belakang ekonomi, sosial, dan akademik yang lebih heterogen. Keberagaman ini mendorong guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inklusif dan adaptif agar dapat memenuhi kebutuhan semua siswa. Menurut penelitian oleh Supriyadi (2021), keberagaman dalam kelas dapat meningkatkan interaksi sosial dan kerja sama antar siswa, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan demokratis. Selain itu, kebijakan zonasi mendorong pemerataan sumber daya pendidikan. Pemerintah mulai mengalokasikan lebih banyak dana dan fasilitas ke sekolah-sekolah yang sebelumnya kurang diminati agar dapat meningkatkan kualitasnya. Menurut laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2022), terdapat peningkatan dalam distribusi bantuan infrastruktur dan pelatihan guru di berbagai sekolah yang terdampak kebijakan zonasi. Dengan meningkatnya kualitas sekolah-sekolah di berbagai zona, maka standar pembelajaran secara keseluruhan juga mengalami peningkatan.

Zonasi sekolah juga berkontribusi pada peningkatan keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak. Dengan sekolah yang lebih dekat dari rumah, orang tua lebih mudah untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan memantau perkembangan belajar anak-anak mereka. Menurut studi yang dilakukan oleh Hasanah (2020), keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Dengan adanya zonasi, komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua menjadi lebih intensif, sehingga dapat meningkatkan dukungan moral dan akademik bagi siswa. Di sisi lain, sistem zonasi juga mengurangi tekanan akademik yang berlebihan pada siswa. Sebelum kebijakan ini diterapkan, banyak siswa dan orang tua yang merasa tertekan untuk masuk ke sekolah favorit dengan persaingan yang sangat ketat. Dengan zonasi, siswa dapat diterima di sekolah berdasarkan domisili mereka tanpa harus melalui seleksi akademik yang memberatkan. Menurut penelitian oleh Wibowo (2021), pengurangan tekanan akademik ini dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis siswa dan memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada proses pembelajaran tanpa tekanan berlebih. Terakhir, kebijakan zonasi mendorong inovasi dalam sistem pembelajaran. Dengan adanya kebijakan ini, sekolah-sekolah yang sebelumnya kurang diminati harus berupaya meningkatkan daya tarik mereka melalui inovasi pembelajaran dan peningkatan kualitas pengajaran. Pemerintah juga mendorong sekolah-sekolah untuk mengembangkan program unggulan berbasis kurikulum yang lebih variatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa di wilayah tersebut. Menurut Arifin (2022), sekolah yang mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan zonasi cenderung mengalami peningkatan kualitas akademik dan kreativitas dalam pembelajaran.

### **Dampak Negatif**

Meskipun kebijakan zonasi bertujuan untuk menciptakan pemerataan pendidikan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak negatif terhadap kualitas pembelajaran. Salah satu dampak utama adalah ketimpangan fasilitas dan sumber daya antar sekolah. Banyak sekolah di daerah perkotaan yang mengalami lonjakan jumlah siswa setelah kebijakan zonasi diterapkan, sementara kapasitas ruang kelas, tenaga pendidik, dan sarana pembelajaran tidak mengalami peningkatan yang memadai. Menurut penelitian oleh Rahmawati (2021), kepadatan siswa dalam satu kelas yang melebihi kapasitas optimal dapat mengurangi efektivitas proses pembelajaran dan menyebabkan penurunan kualitas akademik. Kebijakan zonasi menyebabkan kesulitan dalam adaptasi kurikulum di beberapa sekolah. Sekolah yang sebelumnya memiliki standar akademik tinggi kini harus menyesuaikan dengan keberagaman kemampuan akademik siswa yang lebih luas. Hal ini menuntut guru untuk merancang metode pengajaran yang lebih inklusif, tetapi tidak semua tenaga pendidik memiliki keterampilan dan kesiapan untuk melakukannya. Menurut Santoso (2020), perbedaan yang signifikan dalam kemampuan akademik siswa di kelas yang sama dapat menyebabkan kesulitan dalam memberikan pembelajaran yang efektif dan merata. Dampak negatif lainnya adalah munculnya ketidakpuasan di kalangan orang tua dan siswa terhadap sekolah yang mereka peroleh. Banyak siswa yang sebelumnya bercita-cita masuk ke sekolah favorit justru harus menerima tempat di sekolah yang dianggap memiliki kualitas lebih rendah. Hal ini menyebabkan berkurangnya motivasi belajar pada sebagian siswa dan bahkan mendorong praktik manipulasi alamat agar dapat diterima di sekolah tertentu. Studi yang dilakukan oleh Lestari (2019) menunjukkan bahwa ketidakcocokan antara harapan orang tua dan hasil penempatan sekolah dapat mengurangi tingkat keterlibatan siswa dalam kegiatan akademik dan ekstrakurikuler.

Selain itu, zonasi juga berpotensi meningkatkan beban kerja guru. Dengan meningkatnya jumlah siswa dari latar belakang akademik yang beragam, guru di sekolah-sekolah yang kurang siap menghadapi tantangan dalam mengelola kelas secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas pengajaran karena guru harus beradaptasi dengan kondisi baru tanpa adanya dukungan pelatihan yang memadai. Menurut Widiastuti (2022), peningkatan beban kerja guru tanpa peningkatan dukungan profesional dapat mengurangi efektivitas pengajaran dan berdampak pada pencapaian akademik siswa. Dan kebijakan zonasi dapat memperkuat kesenjangan kualitas pendidikan jika tidak disertai dengan upaya peningkatan mutu sekolah secara menyeluruh. Sekolah-sekolah yang sudah memiliki reputasi baik tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat, sementara sekolah yang dianggap kurang berkualitas masih menghadapi tantangan besar dalam menarik minat siswa dan meningkatkan standar pembelajaran. Oleh karena itu, tanpa adanya strategi yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas sekolah di seluruh zona, kebijakan zonasi berisiko memperburuk ketimpangan dalam sistem pendidikan nasional.

### **Pemerataan Akses Pendidikan**

Pemerataan akses pendidikan di wilayah perkotaan menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang padat serta disparitas ekonomi yang tinggi, banyak siswa dari keluarga kurang mampu mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas. Kebijakan zonasi sekolah hadir sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ini dengan memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan yang setara dalam memilih sekolah tanpa terkendala faktor ekonomi atau prestasi akademik sebelumnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hanushek dan Woessmann (2015), akses pendidikan yang merata berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Dengan memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk mengakses sekolah yang terjangkau, kebijakan zonasi

dapat meningkatkan partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah di wilayah perkotaan. Selain itu, sistem ini juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, di mana siswa dari berbagai latar belakang sosial dapat belajar bersama dan meningkatkan pemahaman terhadap keberagaman. Namun, pemerataan akses pendidikan di wilayah perkotaan masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal kualitas sekolah yang tidak merata. Beberapa sekolah di daerah perkotaan memiliki fasilitas yang lebih lengkap, guru yang lebih berkualitas, serta program pembelajaran yang lebih baik dibandingkan sekolah lainnya. Menurut laporan UNESCO (2020), kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah-sekolah di wilayah perkotaan sering kali disebabkan oleh perbedaan dalam alokasi anggaran, distribusi tenaga pengajar, serta akses terhadap teknologi pendidikan. Selain itu, lonjakan jumlah siswa di sekolah-sekolah tertentu akibat kebijakan zonasi dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam rasio guru terhadap murid. Menurut Supriyadi (2019), efektivitas proses belajar-mengajar sangat bergantung pada jumlah siswa dalam satu kelas, di mana kelas yang terlalu padat dapat mengurangi kualitas interaksi antara guru dan siswa. Di beberapa wilayah perkotaan, sekolah tertentu mengalami peningkatan jumlah siswa secara signifikan setelah kebijakan zonasi diterapkan, tanpa diimbangi dengan peningkatan jumlah tenaga pengajar yang memadai.

Meskipun demikian, kebijakan zonasi tetap memiliki potensi besar dalam mendorong pemerataan akses pendidikan jika didukung dengan strategi implementasi yang tepat. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap sekolah memiliki standar kualitas yang setara dengan meningkatkan fasilitas sekolah yang masih tertinggal, mendistribusikan tenaga pengajar secara lebih merata, serta menyediakan program pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dalam menghadapi keberagaman siswa. Dengan langkah-langkah ini, pemerataan akses pendidikan di wilayah perkotaan dapat tercapai secara lebih efektif. Pada akhirnya, pemerataan akses pendidikan bukan hanya tentang memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa, tetapi juga memastikan bahwa setiap siswa menerima pendidikan berkualitas yang mampu mendukung perkembangan akademik dan sosial mereka. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan kebijakan zonasi harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa sistem ini benar-benar memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat di wilayah perkotaan.

### **Tantangan dan Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan zonasi di wilayah perkotaan menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan kualitas sekolah yang masih terjadi di banyak daerah perkotaan. Menurut laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) (2020), masih terdapat perbedaan signifikan dalam hal fasilitas, tenaga pengajar, serta sumber daya pendidikan antar sekolah. Hal ini menyebabkan sekolah-sekolah yang kurang memiliki daya saing mengalami lonjakan jumlah siswa tanpa adanya peningkatan kualitas layanan pendidikan yang memadai. Selain itu, distribusi guru yang belum merata juga menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan zonasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sudjana (2019), kualitas pendidikan sangat bergantung pada kompetensi tenaga pengajar. Di beberapa daerah perkotaan, sekolah yang sebelumnya memiliki predikat unggulan cenderung memiliki tenaga pendidik yang lebih berkualitas dibandingkan sekolah lainnya. Namun, dengan adanya kebijakan zonasi, distribusi siswa menjadi lebih merata, sementara distribusi tenaga pendidik masih belum optimal. Akibatnya, beberapa sekolah mengalami kesulitan dalam mengakomodasi kebutuhan belajar siswa dengan tingkat akademik yang beragam.

Tantangan lainnya dalam implementasi kebijakan zonasi adalah adanya resistensi dari masyarakat, terutama orang tua siswa. Banyak orang tua yang merasa kebijakan ini membatasi hak mereka dalam memilih sekolah terbaik bagi anak-anak mereka. Menurut

survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan (2021), sekitar 40% orang tua di wilayah perkotaan cenderung tidak setuju dengan kebijakan zonasi karena khawatir anak mereka tidak mendapatkan pendidikan berkualitas. Beberapa dari mereka bahkan melakukan manipulasi alamat tempat tinggal agar anak mereka dapat diterima di sekolah yang dianggap lebih baik. Selain faktor sosial, faktor infrastruktur juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan zonasi. Beberapa sekolah yang mengalami peningkatan jumlah siswa secara signifikan tidak memiliki kapasitas ruang kelas yang memadai. Menurut data UNESCO (2020), standar ideal jumlah siswa per kelas adalah sekitar 20-30 siswa, namun di beberapa sekolah di wilayah perkotaan di Indonesia, jumlah siswa per kelas dapat mencapai 40-50 siswa akibat kebijakan zonasi.

Hal ini tentu berdampak pada efektivitas pembelajaran serta interaksi antara guru dan siswa. Meskipun demikian, kebijakan zonasi tetap memiliki potensi besar dalam pemerataan akses pendidikan jika diimbangi dengan strategi implementasi yang lebih baik. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah seperti peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh, pemerataan distribusi tenaga pengajar, serta peningkatan kapasitas sekolah yang mengalami lonjakan jumlah siswa. Menurut pendapat Tilaar (2018), kebijakan pendidikan yang efektif harus disertai dengan perencanaan jangka panjang yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan zonasi di wilayah perkotaan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Evaluasi kebijakan secara berkala, peningkatan alokasi dana untuk sekolah dengan fasilitas terbatas, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan pendidikan dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan dampak positif dari kebijakan ini. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan kebijakan zonasi dapat benar-benar mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata di wilayah perkotaan.

### **Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Menyukseskan Sistem Zonasi**

Pendidikan yang setara bagi semua lapisan masyarakat adalah suatu keharusan, karena pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memastikan keberhasilan penerapan Sistem Zonasi, langkah-langkah berikut perlu diambil:

- 1) Tindakan penipuan, seperti pembelian kursi sekolah untuk masuk ke sekolah yang diinginkan, harus segera diberantas. Sistem zonasi sebenarnya dirancang oleh pemerintah untuk memfasilitasi perencanaan anggaran, distribusi siswa, dan penempatan tenaga pendidik. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan: penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, penyelarasan kurikulum di semua sekolah, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik di setiap sekolah.
- 2) Sebelum Sistem Zonasi diterapkan, sosialisasi yang luas harus dilakukan agar pemerintah daerah dan masyarakat memahami kebijakan ini secara mendalam.
- 3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri perlu berkoordinasi secara erat sebelum menerapkan kebijakan baru ini.
- 4) Pandangan masyarakat tentang sekolah unggulan perlu diubah. Perubahan ini dapat dicapai melalui pemerataan fasilitas dan infrastruktur pendidikan, peningkatan mutu sekolah, dan penyelarasan kurikulum.

### **SIMPULAN**

Sistem zonasi merupakan kebijakan strategis untuk mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap siswa tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi. Meskipun menghadirkan dampak positif seperti pemerataan sumber daya, keberagaman siswa, dan peningkatan peran orang tua, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain

ketimpangan kualitas sekolah, distribusi guru yang belum merata, serta kurangnya sosialisasi dan infrastruktur pendukung. Praktik manipulasi domisili dan resistensi masyarakat juga menjadi hambatan yang perlu ditangani secara serius. Oleh karena itu, agar sistem zonasi benar-benar efektif, diperlukan langkah konkret berupa peningkatan kualitas sekolah di seluruh zona, distribusi guru yang adil, pengawasan ketat terhadap pelanggaran kebijakan, serta perubahan persepsi masyarakat terhadap sekolah unggulan. Dengan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, sistem zonasi dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mencapai pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2020). Dampak Kebijakan Zonasi terhadap Pola Seleksi Siswa. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 27(2), 112-125.
- Arifin, Z. (2022). Inovasi Pembelajaran dalam Sistem Zonasi. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 10(1), 45-58.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1992). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods*. Allyn and Bacon.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2015). *The knowledge capital of nations: Education and the economics of growth*. MIT press.
- Hasanah, U. (2020). Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan Keluarga*, 5(1), 67-80.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Laporan Tahunan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). *Evaluasi Kebijakan Zonasi Sekolah*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). *Laporan Distribusi Sumber Daya Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Lestari, D. (2019). Ketidakcocokan Harapan Orang Tua dan Penempatan Sekolah. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 12(3), 189-202.
- Mulyasa, E. (2018). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bumi Aksara.
- Mulyasa, E. (2019). Ketimpangan Kualitas Sekolah dalam Kebijakan Zonasi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 15(2), 98-111.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods*. Sage publications.
- Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan. (2021). *Survei Respon Masyarakat terhadap Kebijakan Zonasi*. Jakarta: P2KP.
- Rahmawati, S. (2021). Dampak Kepadatan Siswa terhadap Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 9(1), 34-47.
- Santoso, B. (2020). Adaptasi Kurikulum dalam Kebijakan Zonasi. *Jurnal Pengembangan Kurikulum*, 18(4), 210-223.
- Sudjana, N. (2019). Kompetensi Tenaga Pengajar dan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Tenaga Kependidikan*, 7(2), 78-91.
- Supriyadi, D. (2019). Rasio Guru dan Murid dalam Efektivitas Pembelajaran. *Jurnal Manajemen Kelas*, 6(3), 145-158.
- Supriyadi, D. (2021). Keberagaman Siswa dan Interaksi Sosial di Kelas. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 11(2), 88-101.
- Suyanto, B. (2019). Kebijakan Zonasi dan Pemerataan Kualitas Sekolah. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 16(1), 56-69.
- Tilaar, H. A. R. (2018). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Remaja Rosdakarya.
- UNESCO. (2020). *Laporan Pendidikan Global*. Paris: UNESCO.

- UNESCO. (2020). *Standar Ideal Jumlah Siswa Per Kelas*. Paris: UNESCO.
- Wibowo, A. (2021). Pengurangan Tekanan Akademik dan Kesejahteraan Siswa. *Jurnal Psikologi Perkembangan*, 14(3), 123-136.
- Widiastuti, R. (2022). Beban Kerja Guru dan Kualitas Pengajaran. *Jurnal Beban Kerja Guru*, 8(1), 22-35.
- Jurnal Pendidikan Nasional. (2021). Implementasi Sistem Zonasi di Berbagai Negara. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 25(4), 178-191.
- Permendikbud No. 14 Tahun 2018. Penerimaan Peserta Didik Baru.